

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 30 November 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas Evaluasi persiapan dan kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2018 2. Membahas Evaluasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu Serentak 2019
Ketua Rapat	: Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Polpum mewakili Menteri Dalam Negeri C. Deputi SDM Aparatur mewakili Menteri PANRB D. Jampidum mewakili Jaksa Agung RI E. Asisten Operasi TNI mewakili Panglima TNI F. Asisten Operasi Polri mewakili Kapolri G. Ketua KPU RI H. Ketua Bawaslu RI I. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Jampidum, Asisten Operasi TNI, Asisten Operasi Polri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP dengan agenda Membahas Evaluasi persiapan dan kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2018 dan Membahas Evaluasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu Serentak 2019 , pada hari Kamis, 30 November 2017, dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap evaluasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi II DPR RI meminta kepada semua stakeholder untuk melakukan koordinasi, persiapan dan pelaksanaan secara intensif untuk mewujudkan pemilu yang aman demokratis, jujur dan adil.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk menyelesaikan penandatanganan NPHD untuk Bawaslu di 2 (dua) daerah yang belum terlaksana yaitu Kabupaten Aceh Selatan dan Rote Ndao NTT serta meminta Kemendagri untuk memantau pencairan NPHD KPU dan Bawaslu di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2018 agar tepat waktu pencairan sesuai dengan kebutuhan dan pentahapan Pilkada.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk memantau, mengkoordinasikan dan memastikan realisasi penandatanganan NPHD serta pencairan NPHD Pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di 27 (dua puluh tujuh) daerah (sebagaimana terlampir).
4. Terhadap pelaksanaan KTP elektronik sebagai basis data pemilih dan pemutakhiran data pemilih, Komisi II DPR RI meminta kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan perekaman KTP elektronik agar bisa mencapai 100% perekaman sehingga mencapai kepastian pemenuhan hak konstitusional pemilih pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk dapat memaksimalkan Kinerja sentra Gakkumdu atas Permasalahan Pidana Pemilu dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran demi penegakan proses hukum pemilu.
6. Terkait dukungan Anggaran DKPP, Komisi II DPR RI meminta kepada Sekjen Bawaslu untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran DKPP

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 30 November 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428

